

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN DALAM BUGIS KOTA PONTIANAK

Muhammad Zacky Rizkullah

NPP.31.0599

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: zackyrizkullah12@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Hadi Prabowo, MM.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of slum areas in Kelurahan Dalam Bugis and the collaborative process in handling them through the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the collaborative governance process of KOTAKU program in overcoming slums in Kelurahan Dalam Bugis Pontianak City. **Method:** This study uses qualitative approach method with descriptive method. Data collection techniques were carried out by observation, semi-structured interviews (9 informants), and documentation. **Results:** The findings obtained by the author in this study are that collaborative governance carried out in the KOTAKU program from the five dimensions according to the theory of Ansell and Gash (2008) has run well except for the dimension of shared understanding. In the implementation of the KOTAKU program, inhibiting factors were found, namely targets that were not in accordance with deadlines and programs that were not sustainable. **Conclusion:** The collaborative governance process in the KOTAKU program has been running well in four dimensions but not in one other dimension and there are several factors inhibiting the running of the program.

Keywords: Settlements, Slum, and Collaborative Governance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan kawasan kumuh di Kelurahan Dalam Bugis dan proses kolaborasi dalam penanganannya melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses *collaborative governance* program KOTAKU dalam mengatasi kawasan kumuh di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara semi terstruktur (9 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah *collaborative governance* yang dilakukan dalam program KOTAKU dari kelima dimensi menurut teori ansell dan gash (2008) telah berjalan dengan baik kecuali pada dimensi pemahaman bersama. Dalam pelaksanaan program KOTAKU ditemukan faktor penghambat yaitu target yang tidak sesuai dengan tenggat waktu dan program yang tidak berkelanjutan. **Kesimpulan:** Proses *collaborative governance* dalam program KOTAKU telah berjalan dengan baik dalam empat dimensi namun tidak pada satu dimensi lainnya dan terdapat beberapa faktor penghambat berjalannya program. **Kata Kunci:** Permukiman, Kumuh, dan *Collaborative Governance*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permukiman kumuh wilayah perkotaan di Indonesia menjadi masalah penting yang harus diselesaikan. Kawasan permukiman kumuh ini biasanya disebabkan karena keturunan keluarga yang menetap di kawasan tersebut, kondisi perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah, dan migrasi dari desa ke kota yang akhirnya mengakibatkan kepadatan (Saputra & Hermansyah, 2022). Persentase rumah tangga kumuh perkotaan di Indonesia meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 ada 7,62% rumah tangga kumuh yang tinggal di wilayah perkotaan, angka tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi 13,86% (BPS, 2019).

Beberapa diantara dampak dari keberadaan kawasan permukiman kumuh adalah dampak bagi lingkungan, sosial, dan keamanan lingkungan. Dampaknya terhadap lingkungan adalah banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sedangkan dampak sosial yang dihasilkan dari adanya permukiman kumuh adalah kemiskinan karena penduduk di kawasan permukiman kumuh didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat lain dan akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat. Selain itu, dampak dari keamanan lingkungan adalah dapat menyebabkan terjadinya kriminalitas, hal ini dikarenakan desakan untuk mencukupi kebutuhan harian yang akhirnya memaksa untuk melakukan tindak kriminal (Saputra & Hermansyah, 2022).

Dari beberapa dampak yang ditimbulkan, maka sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan kawasan permukiman kumuh. Hal ini dikarenakan kawasan permukiman merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Namun, karena sifat pekerjaan yang kompleks dalam penyelesaian masalah permukiman kumuh, diperlukan adanya kolaborasi dari berbagai pihak terutama peran masyarakat. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif dalam menciptakan kota yang layak huni bagi masyarakat. Maka dari itu, keterlibatan dari berbagai pihak sangat penting untuk menyukseskan penanganan kawasan permukiman kumuh (Saputra & Hermansyah, 2022). Khususnya partisipasi dari masyarakat, karena dalam pembangunan berbasis pemberdayaan baik pembangunan fisik maupun non fisik partisipasi masyarakat baik individu maupun kelompok merupakan syarat utama yang harus dipenuhi (Suaib, 2023).

Salah satu program yang dibuat pemerintah dalam mendukung pengentasan masalah perumahan dan permukiman kumuh adalah dengan membuat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU adalah program yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2016 dengan integrasi sumber dana dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat seperti pemerintah, swasta, masyarakat, dan lain-lain. Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak merupakan satu dari banyak daerah yang mendapatkan bantuan dari program KOTAKU dan memberikan perhatian secara khusus dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

Dalam pelaksanaannya, penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak belum maksimal. Hal ini ditandai dengan kawasan permukiman kumuh masih banyak tersebar di daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 1063.1/D-PRKP/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak menyatakan luas permukiman kumuh di Kota Pontianak sebesar 150,16 Ha. Penduduk yang menempati permukiman kumuh adalah sebanyak 31.883 jiwa dan sebanyak 3.860 orang diantaranya masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Indikator yang keadaannya paling buruk adalah mengenai aksesibilitas lingkungan yang menunjukkan bahwa baru 64,38% jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis. Selain itu, terkait dengan drainase lingkungan, pelayanan air minum/baku, dan pengelolaan air limbah juga belum maksimal yang ditunjukkan bahwa seluruh indikator tersebut masih dibawah 50%

dari kondisi baik.

Dari hasil Surat Keputusan Walikota tersebut dihasilkan jumlah permukiman kumuh di Kota Pontianak yang tersebar pada 35 kawasan kumuh di 6 kecamatan dan 18 kelurahan. Kecamatan yang paling banyak kawasan dalam kategori kumuh adalah kecamatan Pontianak Timur. Kawasan kumuh di Kecamatan Pontianak Timur tersebar di sepuluh lokasi/kawasan. Kecamatan Pontianak Timur ini terdiri dari tujuh kelurahan, yakni kelurahan Banjar Serasan, kelurahan Parit Mayor, kelurahan Dalam Bugis, kelurahan Saigon, kelurahan Tanjung Hulu, kelurahan Tanjung Hilir, dan kelurahan Tambelan Sampit. Kelurahan dengan kawasan kumuh terbanyak di kecamatan Pontianak Timur adalah kelurahan Dalam Bugis.

Kelurahan Dalam Bugis adalah kelurahan dengan luas Kawasan kumuh terbesar di kecamatan Pontianak Timur dengan luas 8,98 Ha. Berdasarkan data kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak ini menunjukkan bahwa sebagai ibukota provinsi sekalipun Kota Pontianak masih kesulitan dalam mengatasi kawasan permukiman kumuh di wilayahnya. Namun pada tahun 2023 melalui data dari Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 460/D-PRKP/Tahun 2023 menunjukkan terjadi penurunan luas kawasan kumuh di Kelurahan Dalam Bugis menjadi 4,81 Ha. Selain itu, ada satu lokasi kawasan kumuh yang sudah terbebas dari kategori kumuh, yaitu kawasan Kampung Tua. Hal ini menunjukkan bahwa program KOTAKU sebagai *platform* kolaborasi menunjukkan hasil yang positif dalam mengatasi kawasan kumuh.

Dalam pelaksanaan program KOTAKU diperlukan proses kolaborasi yang baik agar tujuan program dapat tercapai. Karena pada dasarnya program KOTAKU dibuat sebagai *platform* kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh. Dengan kolaborasi yang baik maka tujuan program dapat tercapai secara maksimal. Jadi dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi yang dilaksanakan dapat membantu mengurangi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan *collaborative governance* dalam program KOTAKU. Kawasan permukiman kumuh masih banyak tersebar di daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 1063.1/D-PRKP/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak menyatakan luas permukiman kumuh di Kota Pontianak sebesar 150,16 Ha. Penduduk yang menempati permukiman kumuh adalah sebanyak 31.883 jiwa dan sebanyak 3.860 orang diantaranya masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Indikator yang keadaannya paling buruk adalah mengenai aksesibilitas lingkungan yang menunjukkan bahwa baru 64,38% jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis. Selain itu, terkait dengan drainase lingkungan, pelayanan air minum/baku, dan pengelolaan air limbah juga belum maksimal yang ditunjukkan bahwa seluruh indikator tersebut masih dibawah 50% dari kondisi baik.

Dalam penelitian lain, permasalahan yang terjadi adalah masalah komunikasi. Dalam berkomunikasi antar pemangku kepentingan masih banyak terjadi permasalahan seperti penetapan lokasi kumuh yang belum melibatkan masyarakat. Buruknya komunikasi yang terjalin dapat membuat masyarakat tidak percaya terhadap kinerja pemerintah karena tertutupnya informasi. Seharusnya, komunikasi menjadi pondasi dalam proses kolaborasi (Sulaiman, 2021). Masalah lainnya terkait dengan kesepahaman bersama. Menurut penelitian dari Sulaiman (2021) banyak pihak yang masih belum mengerti terkait dengan peran dan kontribusinya dalam program KOTAKU ini. Masyarakat khususnya masih banyak yang belum mengetahui tugas mereka dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini dikarenakan

mereka tidak diikutkan dalam tahap persiapan(Sulaiman, 2021).

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rifki Rositasari dan Asal Wahyuni Erlin Mulyadi pada tahun 2022 yang berjudul “Kolaborasi Stakeholder Dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data diambil melalui teknik pemilihan informan berupa *purposive sampling*. Hal ini berarti informan yang dipilih mengetahui fokus permasalahan penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi *stakeholder* dalam perencanaan program KOTAKU dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi hasil dalam perencanaan program KOTAKU. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dalam perencanaan program KOTAKU sudah melibatkan *stakeholder* dan sudah berjalan baik. Namun, dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan. Terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam perencanaan program KOTAKU di Kecamatan Jaten. Faktor pendukungnya antara lain adanya sosialisasi dan kerjasama *stakeholder* dalam mengidentifikasi masalah. Sedangkan faktor penghambat kolaborasi *stakeholder* adalah adanya perbedaan pendapat dan masalah di waktu(Rositasari, 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lazarus Ramandei dan Sepo Nawipa pada tahun 2023 yang berjudul “Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi, dan penyebaran kuisioner. Pemilihan sampel dalam kuisioner menggunakan cara *accidental sample*. Hal ini berarti sampel diambil berdasarkan kesediaan responden dari sisi waktu dan pemikiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan program KOTAKU, untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan program KOTAKU, dan untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan program KOTAKU. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program masih belum terlaksana secara maksimal dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terkait program dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi(Ramandei & Nawipa, 2023).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Syintia Simarmata, dkk pada tahun 2021 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU dan menganalisa faktor penghambat partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU masih belum maksimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program tidak hanya berasal dari masyarakat, melainkan juga aparatur kelurahan dan pemerintah daerah(Simarmata et al., 2021).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yefni dkk pada tahun 2019 yang berjudul “Pemberdayaan Kawasan Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam penentuan informan, penelitian ini

menggunakan teknik *purposive sampling*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan-tahapan pemberdayaan kawasan permukiman kumuh melalui program KOTAKU. Hasil dari penelitian ini adalah ditemui beberapa tahapan pemberdayaan kawasan permukiman kumuh melalui program KOTAKU antara lain memberikan penyuluhan, fasilitator memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang informasi kawasan kumuh melalui media cetak seperti bulletin dan spanduk, memberikan pelatihan tentang kawasan kumuh dan keterampilan ekonomi, dan memberikan motivasi untuk menggerakkan masyarakat agar ikut berperan dalam memberantas permukiman kumuh (Yefni et al., 2019).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nining Triastuti dkk pada tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2021 di Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas pelaksanaan program KOTAKU dalam mengatasi kawasan kumuh. Hasil dari penelitian ini adalah program KOTAKU di Desa Klitik telah dilaksanakan secara efektif dalam mencapai tujuannya diukur melalui tiga variabel menurut teori Duncan dalam Steers. Pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi antar Kemen PUPR, pemerintah daerah, tim pelaksana KOTAKU dengan *stakeholder* terkait dan juga partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, antara lain kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat kesadaran mengenai lingkungan yang rendah, implementasi pokja PKP yang tidak memadai, dan keterbatasan dana (Triastuti et al., 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis dalam penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak. Penelitian ini memiliki konsep yang berbeda dengan penelitian tersebut yang manaperbedaannya terletak pada fokus penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai efektivitas program, partisipasi masyarakat dalam program, evaluasi program, dan pemberdayaan kawasan kumuh dalam program KOTAKU dalam penanganan pemukiman kumuh. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan *collaborative governance* dalam program KOTAKU di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak. Penelitian ini juga menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008) berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *collaborative governance* dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah yang bertujuan untuk mengartikan atau menafsirkan fenomena atau masalah yang terjadi dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Anggito & Johan, 2018). Sementara menurut Rukin (2019), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan cenderung menggunakan analisis menggunakan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menekankan kepada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu dengan lebih banyak meneliti mengenai kehidupan sehari-hari.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara penulis secara semi terstruktur melakukan wawancara terhadap

9 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Tim Fasilitator Program KOTAKU Kota Pontianak, Kepala Kelurahan Dalam Bugis, Ketua BKM Kelurahan Dalam Bugis, Ketua KSM Kelurahan Dalam Bugis, Pokja PKP Program KOTAKU Kota Pontianak, dan masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) yang memiliki dimensi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ansell dan Gash, *Collaborative Governance* adalah pengaturan pemerintah yang dimana suatu atau beberapa lembaga pemerintah melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan bersama secara resmi, berorientasi pada *consensus* dan *deliberative* yang bertujuan untuk merancang atau mengimplementasikan kebijakan publik, menjalankan program atau mengelola aset publik (Ansell & Gash, 2008). Penulis bertujuan mendeskripsikan *collaborative governance* dalam program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak dengan menggunakan pendapat dari Ansell dan Gash (2008) yang memiliki dimensi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka (*Face-to-face dialogue*) dimaksud adalah adanya pertemuan-pertemuan secara tatap muka yang dilaksanakan untuk membahas sesuatu secara komunikasi dua arah. Komunikasi yang dilakukan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Semuanya yang terlibat harus setara baik dalam hal kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan peluang untuk aksebilitas. Untuk menganalisis dimensi dialog tatap muka ini terdapat dua indikator yang dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait *collaborative governance* dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak yakni koordinasi antar pemangku kepentingan dan komunikasi kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menganalisis bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Fasilitator Kota Program KOTAKU, serta Kelompok masyarakat telah berjalan dengan baik sehingga proses dialog yang terjadi semua pemangku kepentingan terlibat. Dengan terjalannya komunikasi yang baik membuat proses kolaborasi antar pemangku kepentingan berjalan lancar.

Pada dimensi dialog tatap muka dilakukan rapat yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan. Pihak kelurahan menjadi fasilitator terkait tempat dan sarana pendukung kegiatan rapat. Adanya dialog tatap muka ini dapat menampung aspirasi dari berbagai pihak sehingga proses kolaborasi berjalan dengan baik karena terlibatnya seluruh pihak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi Syintia Simarmata dkk. (2021) yang mengatakan bahwa dalam program KOTAKU masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan perencanaan terkait program KOTAKU.

3.2. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan sangat penting dalam menjalankan suatu kolaborasi. Dengan terbangunnya kepercayaan satu sama lain dalam mengatasi kawasan kumuh, seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik. Untuk menganalisis dimensi membangun kepercayaan ini terdapat dua indikator yang dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait *collaborative governance* dalam program

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak yakni partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menganalisis bahwa pihak Kelompok Swadaya Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Bugis berpendapat dalam proses membangun sebuah kepercayaan sudah berjalan baik dengan pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pengentasan kawasan kumuh. Selain itu, keterbukaan informasi kepada seluruh pihak juga membuat kepercayaan masyarakat meningkat dalam proses pengentasan kawasan kumuh.

Proses membangun kepercayaan dilakukan dengan keterbukaan informasi program kepada masyarakat. Hal ini membuat masyarakat percaya terhadap proses yang berjalan dalam program KOTAKU. Hal ini sama dengan yang dikemukakan dalam penelitian Rifki Rositasari dan Asal Wahyuni Erlin Mulyadi (2022) yang menyatakan bahwa terbangunnya kepercayaan dapat terjadi karena adanya keterbukaan data khususnya pada bagian pemetaan masalah.

3.3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses yang dimaksud adalah kerjasama yang mengacu pada alasan sebuah kolaborasi itu harus ada sebagai upaya penanganan kawasan kumuh. Adanya kolaborasi yang terjalin dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak mengacu pada alasan bahwa pihak pemerintah dan seluruh pihak yang terkait ikut bertanggungjawab dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak. Untuk menganalisis dimensi komitmen terhadap proses ini terdapat dua indikator yang dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait *collaborative governance* dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak yakni saling ketergantungan antar pemangku kepentingan dan kepemilikan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menganalisis bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dan Kelurahan Dalam Bugis memiliki komitmen yang sama dan hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan kolaborasi. Seluruh pihak memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang dijalankan dengan baik. Seluruh pihak saling membantu dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan pengentasan kawasan kumuh. Perasaan memiliki terhadap program ini juga penting karena hasil dari program ini dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program berjalan lancar. Seluruh pihak harus berkomitmen untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas masing-masing. Seluruh pihak sudah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh di Kelurahan Dalam Bugis. Hal serupa juga dikemukakan oleh Nining Triastuti dkk. (2023) yang mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi dari seluruh pihak menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas pelaksanaan program KOTAKU.

3.4. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama yang terjadi dalam kolaborasi ini berguna untuk memberi kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui informasi yang ada. Untuk menganalisis dimensi pemahaman bersama ini terdapat dua indikator yang dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait *collaborative governance* dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak yakni misi yang jelas dan definisi masalah.

Dari hasil wawancara, penulis menganalisis bahwa pemberian informasi terkait program pengentasan kawasan kumuh kurang berjalan maksimal. Waktu sosialisasi yang singkat dan juga pergantian posisi yang terjadi pada perangkat daerah menjadi penyebab sulitnya pemberian informasi yang seharusnya terjadi. Sehingga kelompok masyarakat tidak

menjalankan tugasnya secara maksimal dan penyampaian informasi kepada masyarakat juga tidak maksimal.

Pada dimensi pemahaman bersama ini tidak berjalan dengan baik karena tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dianggap tidak cukup untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi. Hal ini berbeda dengan yang dikemukakan dalam penelitian Yefni dkk. (2019) yang mengungkapkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh pihak fasilitator program kepada masyarakat berjalan dengan baik dengan memanfaatkan berbagai media. Sedangkan, pada wawancara bersama pihak fasilitator program KOTAKU Kota Pontianak mengungkapkan bahwa waktu yang diberikan terlalu singkat untuk memberikan sosialisasi secara mendalam.

3.5. Hasil Sementara

Hasil sementara adalah hal yang telah dicapai sejauh ini dari pelaksanaan program kotaku sebagai upaya pengentasan kawasan kumuh. Hasil yang dicapai sangat penting untuk mengukur keberhasilan kolaborasi yang dilakukan dalam program. Untuk menganalisis dimensi pemahaman bersama ini terdapat satu indikator yang dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait *collaborative governance* dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak yakni hasil dari program.

Dari hasil wawancara, penulis menganalisis bahwa hasil dari program kolaborasi dalam mengatasi kawasan kumuh dirasakan positif. Hasil yang dirasakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya dari segi kenyamanan lingkungan hidup, namun juga memberikan potensi dampak positif bagi segi ekonomi masyarakat.

Hasil sementara ini adalah hasil dari proses kolaborasi yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah. Hasil yang dirasakan masyarakat Kelurahan Dalam Bugis sudah baik dengan banyaknya perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Selain itu juga terjadi penurunan yang cukup signifikan terkait dengan luasan kawasan kumuh di Kelurahan Dalam Bugis. Hal serupa diungkapkan oleh Simarmata dkk. (2021) yang mengungkapkan bahwa “dari segi kualitas, keberhasilan suatu program ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan”.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat dalam rangka mengentaskan kawasan kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh juga berperan sebagai sarana kepada masyarakat untuk mengatur dan melaksanakan program ini secara mandiri. Penulis menemukan temuan penting yakni kolaborasi antar pemangku kepentingan yang dilaksanakan dalam program KOTAKU di Kelurahan Dalam Bugis berjalan cukup baik dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Sama halnya dengan temuan Simarmata dkk. bahwa pada tahap partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif, terlihat dari banyaknya masyarakat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan program KOTAKU (Simarmata, 2021).

Seperti program lainnya, program Kota Tanpa Kumuh ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program Kota Tanpa Kumuh. Berbeda dengan yang dikemukakan dalam penelitian Yefni dkk. (2019) yang mengungkapkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh pihak fasilitator program kepada masyarakat berjalan dengan baik dengan memanfaatkan berbagai media. Sedangkan, pada wawancara bersama pihak fasilitator program KOTAKU Kota Pontianak mengungkapkan bahwa waktu yang diberikan terlalu singkat untuk memberikan sosialisasi secara mendalam.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat *collaborative governance* dalam program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dalam Bugis ini yakni target yang diberikan tidak sesuai dengan tenggat waktu program dan program yang tidak berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* Dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak penulis menarik kesimpulan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak pada empat dimensi telah berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor penghambat dalam penerapan program Kotaku dalam mengatasi kawasan kumuh adalah target yang tidak sesuai dengan tenggat waktu dan juga tidak berlanjutnya program KOTAKU.

Secara teoritis, terdapat satu poin dari teori *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash yang digunakan penulis dalam penelitian ini masih belum maksimal penerapannya. Adapun indikator yang belum terpenuhi secara maksimal yaitu *shared understanding*. Informasi yang diberikan kepada masyarakat masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu biaya dan waktu penelitian. Ruang lingkup penelitian juga sebatas satu kelurahan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis berharap ada penelitian lanjutan terkait *collaborative governance* dalam program kota tanpa kumuh demi menyempurnakan penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Lurah Kelurahan Dalam Bugis beserta jajaran dan masyarakatnya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Johan, S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif-Google Books. Ed. Ella Deffi Lestari. Jawa Barat: CV Jejak. <https://www...>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and ...* <https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/18/4/543/1090370>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Ramandei, L., & Nawipa, S. (2023). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Hamadi *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

- https://www.researchgate.net/profile/Lazarus-Ramandei/publication/371779209_Evaluasi_Program_Kota_Tanpa_Kumuh_KOTAKU_terhadap_Pencegahan_dan_Penanganan_Kawasan_Permukiman_Kumuh_Perkotaan_di_Kelurahan_Hamadi_Distrik_Jayapura_Selatan_Kota_Jayapura/links/64944758c41fb852dd26f194/Evaluasi-Program-Kota-Tanpa-Kumuh-KOTAKU-terhadap-Pencegahan-dan-Penanganan-Kawasan-Permukiman-Kumuh-Perkotaan-di-Kelurahan-Hamadi-Distrik-Jayapura-Selatan-Kota-Jayapura.pdf
- Rositasari, R. (2022). Kolaborasi Stakeholder Dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*. <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/66544>
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GyWyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=metodologi+penelitian+kualitatif&ots=E9CupUxnD4&sig=AJ7C6VQGXqk1mQI_rWtYh5oQZY
- Saputra, W., & Hermansyah, M. H. (2022). Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi. ... *Esjo): Jurnal Ilmu* <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/esjo/article/view/10929>
- Simarmata, D. S., Tresiana, N., & ... (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal* <https://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/104>
- Suaib, M. S. (2023). *PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-vLMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=pembangunan+dan+pemberdayaan+masyarakat&ots=bwtpKsciI7&sig=4HUou0k3mC7oDR8THiYntH7dw4g>
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan *Majalah Media Perencana*. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>
- Triastuti, N., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2021 DI DESA KLITIK KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN. *Jl@ P*. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/9001>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Yefni, Y., Haris, M., & Pratiwi, R. U. (n.d.). PEMBERDAYAAN KAWASAN KUMUH MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) KOTA PEKANBARU. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian* <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jmm/article/view/84>